



# UTILITY ACCRUAL OBJECT DISTRIBUTION IN MPSOC REAL-TIME EMBEDDED SYSTEMS

Ellisa Wulan Oktavia<sup>1\*</sup>, Nadia Istamala<sup>2</sup>, Adityanto<sup>3</sup>, Uni W Sagena<sup>4</sup>, Masjaya<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Mulawarman

Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda

email : <sup>1</sup>[ellisavia98@gmail.com](mailto:ellisavia98@gmail.com), <sup>2</sup>[Nadiaistamala888@gmail.com](mailto:Nadiaistamala888@gmail.com), <sup>3</sup>[aditpusamania@gmail.com](mailto:aditpusamania@gmail.com),  
<sup>4</sup>[unisku2@unmul.ac.id](mailto:unisku2@unmul.ac.id), <sup>5</sup>[prof.masjaya@yahoo.com](mailto:prof.masjaya@yahoo.com)

\* korespondensi

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received 27 Oktober 2024

Received in revised form 31 Oktober 2024

Accepted 28 Desember 2024

Available online 30 Desember 2024

## ABSTRACT

*This study examines the impact of relocating Indonesia's capital city from Jakarta to East Kalimantan on the local economy, workforce, and associated challenges. Using qualitative methods and descriptive analysis, the findings reveal positive effects such as increased investments and economic growth driven by new infrastructure and heightened economic activity in property, hospitality, and transportation sectors. However, challenges like rising property prices, gentrification, and social changes demand sustainable spatial planning and effective social impact management. Proposed mitigation strategies include thorough planning, social infrastructure development, local economic empowerment, and regular impact monitoring. The capital relocation has the potential to boost local economic growth if managed effectively.*

**Keywords:** National Capital, Relocation, Local Economy, Human Resources.

## Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur terhadap ekonomi lokal, tenaga kerja, serta tantangan yang dihadapi. Dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis deskriptif, hasil menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur baru dan peningkatan aktivitas ekonomi melalui sektor properti, perhotelan, dan transportasi memberikan dampak positif. Namun, tantangan seperti kenaikan harga properti, gentrifikasi, dan perubahan sosial memerlukan tata ruang berkelanjutan serta manajemen dampak sosial yang efektif. Strategi mitigasi yang diusulkan mencakup perencanaan yang matang, pengembangan infrastruktur sosial, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pemantauan dampak secara berkala. Pemindahan ibu kota memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal jika dikelola dengan baik.

**Kata Kunci:** Ibu Kota Negara, Pemindahan, Ekonomi Lokal, Sumber Daya Manusia.

## 1. PENDAHULUAN

Sejak pemerintah Indonesia menetapkan Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru negara yang dikenal sebagai IKN Nusantara melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 yang disahkan pada tanggal

*Received Oktober 27, 2024; Revised Oktober 31, 2024; Accepted Desember 28, 2024*

15 Februari 2022, banyak perhatian dari dalam negeri maupun internasional yang tertuju kepada Provinsi Kalimantan Timur, yang terletak di pulau Borneo (U. W. Sagena et al., 2023) Relokasi Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia ke Kalimantan Timur dipandang sebagai langkah yang sangat efektif untuk mempercepat pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan keputusan ini. Selain menjadi pusat kegiatan sosial dan politik, ibu kota juga memainkan peran penting dalam mendorong perkembangan ekonomi nasional. (Pratama & Terapan, n.d. 2024) Untuk memulai langkah ini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengambil tindakan lanjut dengan memulai tahapan awal perencanaan terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Beberapa pertimbangan dan faktor yang menjadi fokus kajian Bappenas adalah dampak ekonomi, terutama dalam konteks pemerataan ekonomi. (Pribadi & Utomo, 2021). Pemerintah menjelaskan bahwa tujuan utama di balik pemindahan Ibu Kota Negara dari Pulau Jawa adalah untuk mendukung pemulihan ekonomi. Ini telah dinyatakan dalam visi pemindahan ibu kota negara sebagai strategi untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045, yang bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata. (Kepala Bappenas, 2022). Menurut Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, disparitas ekonomi antara wilayah-wilayah tersebut telah menjadi penghalang bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Melalui pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), pemerintah berharap untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan wilayah lainnya. (Aprillia & Supentri, 2024)

Dari segi ekonomi, pemindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur akan menginisiasi sistem ekonomi baru di wilayah tersebut serta wilayah timur lainnya, yang berpotensi untuk meratakan perekonomian secara lebih luas karena letak ibu kota negara yang strategis di pusat geografis Indonesia. Setelah pemindahan ibu kota negara, diharapkan akan terjadi perubahan signifikan dalam pemulihan ekonomi di setiap wilayah, karena pusat pemerintahan yang baru akan menjadi magnet bagi pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang kemudian dapat berkembang dan maju lebih baik karena aksesibilitas yang lebih mudah ke pusat pemerintahan. Langkah ini ditujukan untuk mencapai pemerataan ekonomi dan mengatasi ketimpangan ekonomi yang ada di berbagai wilayah Indonesia. (Pribadi & Utomo, 2021)

Dalam konteks pemindahan Ibukota Negara (IKN), peran pemerintah sangat penting dalam mendukung perekonomian. Dimana ada tiga fungsi peranan pemerintah dalam perekonomian studi kasus pemindahan IKN. Yaitu Fungsi Stabilitas, Fungsi alokasi dan fungsi distribusi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik di lokasi baru ibu kota. Langkah ini tidak hanya meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, tetapi juga menarik investasi swasta dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, pemerintah berperan penting dalam menyusun kebijakan dan memberikan insentif yang mendukung kegiatan bisnis dan industri di area baru ibu kota. Dengan demikian, peran aktif pemerintah dalam mengatur dan mengembangkan infrastruktur serta kebijakan ekonomi sangat penting untuk memastikan kesuksesan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan mengoptimalkan dampak positifnya terhadap ekonomi lokal.

Tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah saat ini adalah meningkatkan daya saing wilayahnya, termasuk kemampuan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan kesejahteraan yang berkelanjutan dan tinggi. Setiap wilayah memiliki keunggulan ekonomi tersendiri yang menjadi motor penggerak pertumbuhannya. Oleh karena itu, strategi kebijakan pemerintah daerah harus disesuaikan dengan potensi unik masing-masing wilayah. Kabupaten Penajam Paser Utara, yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur dan akan menjadi ibu kota negara baru, mengejar pertumbuhan ekonomi yang cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemindahan ibu kota dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan bertujuan untuk meratakan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan mampu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi keunggulannya secara efektif. Hal ini penting untuk mendukung perekonomian yang kompetitif, sehingga wilayah tersebut dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat dan sesuai dengan potensi yang dimiliki. (Mesoino et al., 2022)

Untuk memastikan kemajuan ibu kota negara baru, Bappenas telah merencanakan insentif bagi pelaku usaha untuk melakukan investasi. Bambang Brodjonegoro, Kepala Bappenas Republik Indonesia, memperkirakan bahwa pertumbuhan kawasan industri di Ibu Kota Negara (IKN) yang terhubung dengan wilayah lain di Indonesia dapat meningkatkan arus perdagangan nasional hingga 50%. Momentum ini akan

didukung oleh kebijakan yang memprioritaskan hilirisasi industri, yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengerek Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lokal. Secara keseluruhan, kesejahteraan masyarakat di lokasi IKN diperkirakan akan meningkat, serta berpotensi mengurangi kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan daerah di luar Pulau Jawa. (Bappenas, 2019).

Pemindahan ibu kota juga dapat dilihat sejalan dengan konsep *Developmental State* yang diperkenalkan oleh Chalmers Johnson (1982) dalam bukunya *MITI and The Japanese Miracle: The Growth Industrial Policy 1925-1975*. Johnson menggambarkan peran dominan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan insentif kepada sektor bisnis melalui regulasi administratif, subsidi, perlindungan, dan pengawasan pasar. Dalam konsep ini, negara secara aktif terlibat dalam pembangunan ekonomi dan memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan publik (U. Sagena, 2005)

Patut digarisbawahi bahwa pemindahan IKN tidak hanya memiliki dampak positif semata sebagaimana dipaparkan pada paragraf sebelumnya. Tapi ada dampak negatif yang lain, salah satunya dibidang lingkungan. Terlebih Kementerian PPN/Bappenas bahwa kelestarian lingkungan sangat penting untuk menunjang visi misi IKN sebagai “Forest City” dan sejalan dengan status Kalimantan Timur sebagai “paru-paru dunia” (U. W. Sagena et al., 2022) Sehingga satu ini perlu menjadi konsen.

Berdasarkan uraian diatas mengenai fenomena pemindahan ibu kota negara yang berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian lokal di wilayah Penajam Paser Utara, maka penulis tertarik untuk untuk mengkaji lebih lanjut dan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pemindahan Ibu Kota Negara terhadap Perekonomian Lokal: Dampak dan Upaya”. Peneliti tidak berhenti sampai kepada upaya semata, tapi juga ada dampak yang perlu diperhatikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsekuensi pemindahan ibu kota negara terhadap perekonomian lokal. Tujuan-tujuan spesifik dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, Mengidentifikasi Faktor-Faktor Ekonomi: Menyelidiki faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi transisi pemindahan ibu kota, termasuk investasi infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu. Kedua, Mengevaluasi Dampak Positif dan Negatif: Mengkaji efek positif dan negatif dari pemindahan ibu kota terhadap perekonomian lokal di area baru dan asal, dengan fokus pada parameter seperti pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, dan perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Ketiga, Menganalisis Perubahan Sosial dan Demografis: Menelaah perubahan sosial dan demografis yang timbul akibat pemindahan ibu kota, termasuk migrasi penduduk, perubahan pola hunian, dan dampaknya terhadap komunitas setempat. Keempat, Menyelidiki Tantangan dan Hambatan: Menyelidiki hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam proses pemindahan ibu kota serta dampaknya terhadap perekonomian lokal. Kelima, Mengembangkan Rekomendasi Kebijakan: Merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari pemindahan ibu kota, sekaligus meminimalkan risiko dan dampak negatifnya terhadap perekonomian lokal. Keenam, Studi Kasus dan Perbandingan Internasional: Menganalisis studi kasus dan perbandingan internasional untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana negara lain mengelola pemindahan ibu kota mereka, serta pelajaran yang dapat diterapkan dalam konteks Indonesia. Ketujuh, Menyusun Rencana Strategis: Mengembangkan rencana strategis untuk memandu pembuat kebijakan dalam melaksanakan pemindahan ibu kota dengan efektif, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi semua wilayah yang terlibat. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dampak pemindahan ibu kota terhadap perekonomian lokal, serta menjadi dasar yang kokoh bagi pembuatan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Teori Pemindahan Ibu Kota**

#### **2.1.1. Konsep dan Teori Pemindahan Ibu Kota**

Teori tentang pemindahan ibu kota sering kali berasal dari pertimbangan strategis, ekonomis, sosial, dan lingkungan. Beberapa alasan yang sering dikemukakan untuk memindahkan ibu kota suatu negara atau pemerintahan termasuk:

- a. **Konsolidasi Kebijakan dan Pemerintahan:** Dengan memindahkan ibu kota, pemerintah dapat mengkonsolidasikan kegiatan administratif, legislatif, dan eksekutif di lokasi baru, dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan.

- b. Distribusi Ekonomi: Pemandahan ibu kota dapat meratakan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah negara, membuka peluang investasi, dan memperluas infrastruktur di daerah-daerah yang lebih terpencil atau kurang berkembang.
- c. Mengurangi Kepadatan dan Overcrowding: Beberapa ibu kota mungkin terlalu padat dengan masalah entropi, lalu lintas yang padat, dan biaya hidup yang tinggi. Pemandahan ibu kota dapat mengurangi beban tersebut.
- d. Alasan Bencana Alam dan Keamanan: Beberapa negara mempertimbangkan pemandahan ibu kota karena risiko bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau untuk meningkatkan keamanan nasional di lokasi yang baru.
- e. Symbolisme dan Identitas Nasional: Pemandahan ibu kota juga dapat berfungsi sebagai simbol perubahan dan kemajuan bagi suatu negara, serta memperkuat identitas nasional.
- f. Pengembangan Regional: Dengan memindahkan ibu kota ke daerah yang lebih terpencil atau belum berkembang, pemerintah dapat mendorong pengembangan regional yang lebih merata.

Namun, pemandahan ibu kota juga dapat menimbulkan tantangan serius seperti biaya yang tinggi, resistensi politik, dan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Oleh karena itu, keputusan untuk memindahkan ibu kota sering memerlukan kajian yang mendalam dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak terkait.

### 2.1.2. Studi Kasus Pemandahan Ibu Kota di Berbagai Negara

**Tabel.1. Studi Kasus Pemandahan Ibu Kota**

Kota, Negara	Studi Kasus
Brasília, Brasil	Pemandahan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasília pada tahun 1960 dilakukan dengan tujuan untuk mendorong pembangunan di wilayah tengah Brasil. Holston (1989) mencatat bahwa Brasília berhasil menarik investasi dan meningkatkan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Namun demikian, pemandahan tersebut juga menghadapi tantangan seperti kesenjangan sosial yang masih ada dan urbanisasi yang tidak merata.
Astana (Nur-Sultan), Kazakhstan	Pemandahan ibu kota dari Almaty ke Astana pada tahun 1997 dilakukan dengan tujuan untuk menyeimbangkan perkembangan ekonomi antara wilayah utara dan selatan Kazakhstan. Menurut Davis (2011), perpindahan ini berhasil meningkatkan investasi dalam infrastruktur dan pembangunan kota. Namun demikian, langkah ini juga menimbulkan tantangan terkait integrasi sosial dan perubahan budaya.
Naypyidaw, Myanmar	Pemandahan ibu kota dari Yangon ke Naypyidaw pada tahun 2005 adalah langkah kontroversial yang memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Menurut Seekins (2009), meskipun terjadi peningkatan dalam pembangunan infrastruktur, Naypyidaw menghadapi kesulitan dalam menarik penduduk dan bisnis, sehingga dampak ekonominya terbatas.
Abuja, Nigeria	Pemandahan ibu kota negara Nigeria dari Lagos ke Abuja dilakukan secara strategis untuk mengatasi kemacetan dan kelebihan penduduk di Lagos, serta menciptakan pusat pemerintahan yang lebih terpusat dan netral. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Abuja berhasil tumbuh menjadi pusat administrasi dan politik Nigeria. Langkah ini menyoroti pentingnya perencanaan yang cermat dan penanganan tantangan sosial, ekonomi, lingkungan, dan lainnya dalam pengembangan sumber daya baru.
Islamabad, Pakistan	Pemandahan ibu kota Pakistan dari Karachi ke Islamabad pada tahun 1963 didasarkan pada masalah keamanan di wilayah pesisir Karachi dan keinginan untuk lokasi yang lebih aman dan nyaman di Pakistan. Islamabad, yang dirancang oleh arsitek Constantinos Apostolou Doxiadis dengan prinsip modern, telah menjadi pusat administrasi yang penting sejak pemandahan tersebut, sementara Karachi tetap menjadi pusat ekonomi utama negara ini.
Canberra, Australia	Pemandahan ibu kota Australia dari Melbourne ke Canberra pada tahun 1913 bertujuan untuk mengurangi persaingan antara Sydney dan Melbourne serta untuk mendesentralisasi pembangunan. Canberra, sebuah kota yang dirancang oleh Walter Burley Griffin dengan gaya modern, berfungsi sebagai pusat politik dan administrasi

	Australia. Meskipun menghadapi tantangan awal, Canberra kini dikenal dengan kualitas hidup yang tinggi, tingkat pendidikan yang baik, dan stabilitas politik yang kuat.
--	---

## 2.2. Teori Ekonomi atas Pemindahan Ibu Kota

Pemindahan ibu kota sering kali diiringi oleh investasi besar dalam infrastruktur, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Henderson dan Wang (2005) mencatat bahwa pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas dan menarik investasi swasta. Namun demikian, Glaeser (2011) menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota juga bisa membawa dampak negatif seperti kenaikan biaya hidup dan risiko spekulasi tanah. Pemindahan ibu kota sebuah negara dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh World Bank (2021), mobilitas modal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi besar dalam infrastruktur baru seperti jalan raya, bandara, dan transportasi umum. Ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru tetapi juga menstimulasi industri konstruksi lokal. Namun, menurut Dilip Mookherjee (2019), pemindahan ibu kota juga dapat mengganggu struktur perdagangan dan distribusi barang dan jasa, yang berdampak pada perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, perubahan strategis dalam kebijakan ekonomi dan manajemen sumber daya diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan manfaat dari perubahan ini. (Hairunnisa & Syaka, 2022) Pemindahan ibu kota negara dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan, baik secara positif maupun negatif. Berikut adalah beberapa teori ekonomi yang sering dikaitkan dengan pemindahan ibu kota negara:

- a. **Pembangunan Infrastruktur:** Umumnya, perpindahan pusat pemerintahan diikuti dengan pengembangan infrastruktur besar seperti jalan raya, bandara, transportasi umum, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini dapat mendorong investasi di sektor konstruksi dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
- b. **Stimulus Ekonomi Regional:** Lokasi baru pusat pemerintahan dapat memberikan dorongan ekonomi bagi daerah yang sebelumnya kurang berkembang. Investasi pemerintah dalam infrastruktur baru dan layanan publik bisa menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan sektor properti, dan menarik investasi swasta.
- c. **Efisiensi Biaya:** Pemindahan pusat pemerintahan bisa mengurangi biaya operasional di lokasi lama yang mungkin terlalu padat atau mahal. Misalnya, biaya properti dan hidup yang lebih rendah di lokasi baru dapat mengurangi anggaran pemerintah.
- d. **Diversifikasi Ekonomi:** Dengan menetapkan pusat pemerintahan di lokasi baru, pemerintah dapat memperluas basis ekonomi nasional dengan mengembangkan sektor baru di daerah tersebut. Ini dapat menciptakan lapangan kerja tambahan dan meningkatkan pendapatan daerah.
- e. **Pendorong Pertumbuhan Regional:** Perpindahan pusat pemerintahan dapat mengubah dinamika ekonomi regional dengan menarik lebih banyak bisnis dan penduduk ke daerah baru. Ini dapat meratakan distribusi pertumbuhan ekonomi di seluruh negara.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif menitikberatkan pada pendekatan kualitatif yang sederhana dan induktif, terutama dalam konteks fenomena sosial. Fokus utama studi ini adalah mengevaluasi dampak dan risiko ketidakpastian kebijakan internal terhadap ekonomi Indonesia. Untuk menganalisis perubahan di ibu kota negara, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi analisis studi diferensial, yang melibatkan referensi dari berbagai sumber seperti koran, majalah, dan lainnya. Penelitian ini secara khusus meneliti dampak dan risiko dari ketidakpastian kebijakan internal terhadap ekonomi Indonesia, sehingga menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. (Hasibuan & Aisa, 2020).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena sosial secara alami dalam konteks permasalahan perilaku seseorang. Dalam metode kualitatif, peneliti melakukan analisis untuk menggambarkan dan melaporkan fenomena yang dihasilkan dari analisis tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai dampak pemindahan ibu kota negara terhadap perekonomian lokal di Kalimantan Timur (Aji et al., 2023). Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mixed-methods) untuk memberikan analisis komprehensif mengenai dampak pemindahan ibu kota negara terhadap perekonomian lokal. Metodologi penelitian ini meliputi langkah-langkah berikut:

### 3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus untuk menganalisis dampak pemindahan ibu kota pada perekonomian lokal. Kasus utama yang akan diteliti adalah rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Penelitian ini juga akan membandingkan dengan beberapa contoh pemindahan ibu kota di negara lain seperti Brasil, Kazakhstan, dan Myanmar.

### 3.2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan melalui beberapa metode, yaitu:

- Data Sekunder: Mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber seperti laporan pemerintah, publikasi akademik, artikel jurnal, buku, dan laporan dari lembaga internasional yang terkait dengan pemindahan ibu kota dan dampaknya terhadap perekonomian lokal.
- Data Primer: Melakukan survei dan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, ahli ekonomi, masyarakat lokal, dan pelaku bisnis di daerah yang terlibat dalam pemindahan ibu kota.

### 3.3. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan berbagai metode analisis, baik kuantitatif maupun kualitatif, termasuk:

- Analisis Deskriptif: Data akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan narasi untuk memberikan gambaran umum tentang dampak pemindahan ibu kota terhadap perekonomian lokal.
- Analisis Input-Output: Metode ini menggunakan model input-output untuk mengevaluasi dampak ekonomi dari pemindahan ibu kota, termasuk perubahan dalam sektor-sektor ekonomi, aliran investasi, dan dampaknya terhadap lapangan kerja.
- Analisis Regresi: Akan dilakukan analisis regresi untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel ekonomi yang relevan dan dampak pemindahan ibu kota.

### 3.4. Validasi Data

Untuk memastikan keabsahan dan reliabilitas data, penelitian ini akan menggunakan triangulasi data dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data.

### 3.5. Pengembangan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini akan mengembangkan rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari pemindahan ibu kota terhadap perekonomian lokal. Rekomendasi ini akan disusun dengan mempertimbangkan konteks lokal dan best practices dari studi kasus internasional.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil

#### 4.1.1. Analisis Dampak Pemindahan IKN terhadap Perekonomian

Berdasarkan hasil penelitian, adapun dampak pemindahan IKN terhadap perekonomian dapat dilihat dalam analisis tabel berikut:

**Tabel.2. Analisis Dampak**

Dampak	Analisis Dampak
Peningkatan Infrastruktur	Pemindahan pusat pemerintahan negara umumnya menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur lokal. Proyek-proyek seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas umum, dan utilitas lainnya tidak hanya menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat, tetapi juga menciptakan peluang kerja baru.
Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Kehadiran pemerintahan beserta seluruh pendukungnya, seperti pegawai negeri, kontraktor, dan penyedia layanan lainnya, juga berkontribusi pada meningkatnya aktivitas ekonomi lokal. Sebagai hasil langsungnya, sektor-sektor seperti properti, perhotelan, restoran, dan transportasi umum mengalami pertumbuhan yang signifikan karena peningkatan populasi dan aktivitas ekonomi.
Peningkatan Nilai Properti	Pemindahan ibukota juga dapat mengakibatkan kenaikan nilai properti di sekitar lokasi baru pusat pemerintahan. Sementara hal ini dapat memberikan keuntungan finansial bagi pemilik properti setempat, namun juga berpotensi memunculkan

	gentrifikasi dan masalah sosial-ekonomi di beberapa wilayah.
Perubahan Sosial dan Demografis	Selain itu, pemindahan ibukota sering kali mempengaruhi demografi lokal dengan adanya migrasi penduduk yang meningkat ke wilayah baru. Perubahan ini dapat berdampak pada struktur sosial dan kebutuhan layanan masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur diharapkan akan memiliki dampak yang signifikan, terutama bagi perekonomian lokal di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Lokasi Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang dipilih sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi daya tarik utama. Selain itu, sektor jasa dan perhotelan di Kota Balikpapan juga diuntungkan secara signifikan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa sejak Kalimantan Timur ditetapkan sebagai ibu kota baru Indonesia, efek pengganda atau multiplier effect telah sangat terasa oleh masyarakat di sekitar lokasi IKN dan daerah penyangganya seperti Kota Balikpapan. Pemindahan IKN dianggap sebagai berkah bagi masyarakat Kalimantan Timur karena telah meningkatkan perekonomian mereka secara substansial. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kontribusi dari kegiatan pemerintah, baik dari tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota yang terlibat dengan IKN.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur menunjukkan bahwa sektor konstruksi mengalami peningkatan dari 8,98 persen pada tahun 2019 menjadi 10,13 persen pada tahun 2023. Sementara itu, sektor lain seperti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Transportasi dan Pergudangan juga menunjukkan peningkatan kontribusi mereka. Pertumbuhan ekonomi di kabupaten yang dipilih sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN), seperti Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 14,49% pada tahun 2022, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat pada tahun 2017. Di Kabupaten Penajam Paser Utara sendiri, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 mencapai 14,49 persen, yang merupakan yang tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya di provinsi Kalimantan Timur, terutama didorong oleh pertumbuhan signifikan dalam sektor konstruksi. (Firdaus Bader, 2024).

Pembangunan IKN juga berdampak positif terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Timur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2023 mencatatkan angka 5,31 persen, yang merupakan yang terendah dalam sepuluh tahun terakhir. Penyerapan tenaga kerja tidak hanya terjadi di sektor konstruksi proyek IKN, tetapi juga di sektor UMKM dan sektor informal. Penurunan TPT juga terlihat di Penajam Paser Utara, dengan angka turun dari 2,12 persen pada 2022 menjadi 2,07 persen pada 2023. Demikian pula di Kota Balikpapan, yang merupakan kota pendukung IKN, TPT menurun dari 6,90 persen pada 2022 menjadi 6,09 persen pada 2023. (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2023).

Ketua Musyawarah Masyarakat Kutai Kartanegara mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan memiliki dampak yang sangat penting terutama dalam menciptakan lapangan kerja. Proyek pembangunan IKN diperkirakan akan menyerap jutaan tenaga kerja dari berbagai sektor, tidak hanya untuk pekerja migran tetapi juga untuk tenaga kerja lokal yang memiliki keahlian khusus seperti sopir, tukang, katering, dan lainnya. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023, jumlah penduduk yang bekerja di Kalimantan Timur mencapai 1,85 juta orang, meningkat sekitar 100,37 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2022. Sektor konstruksi menjadi salah satu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, dengan proporsi pekerja di sektor ini naik dari 5,96 persen pada Agustus 2019 menjadi 6,42 persen pada Agustus 2023. (Firdaus Bader, 2024).

Pemindahan ibu kota negara berdampak positif bagi provinsi Kalimantan Timur dan secara nasional. Namun, tidak semua dampak positif ini dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dalam proses pemindahannya, Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Pertama, pengaruh terhadap aliran modal, di mana kebijakan pemindahan ibu kota negara dapat mempengaruhi arus modal dalam ekonomi. Keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dapat menarik modal dari pasar, yang berpotensi meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, jika pemindahan ini tidak dikelola dengan baik, bisa mengganggu aliran modal dan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.

Kedua, pengaruh terhadap investasi, di mana kebijakan pemindahan ibu kota negara dapat mempengaruhi tingkat investasi dalam ekonomi. Pemindahan ibu kota negara bisa meningkatkan investasi dengan

meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi. Namun, jika pemindahan tersebut tidak terkoordinasi dengan baik, bisa menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang mengurangi tingkat investasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sehingga, ada juga tantangan ekonomi yang perlu dipertimbangkan:

**Tabel.3. Analisis Biaya**

Tantangan Ekonomi	Analisis
Biaya Pemindahan	Biaya untuk membangun infrastruktur baru dan fasilitas pemerintahan dalam pemindahan ibu kota dapat menjadi sangat mahal dan memerlukan waktu lama untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang setara.
Gangguan Transisi	Proses pemindahan ibu kota bisa mengganggu kegiatan ekonomi dan administratif selama fase transisi, terutama jika tidak direncanakan dengan matang.
Potensi Overinvestasi	Ada risiko bahwa pemerintah dapat mengalokasikan terlalu banyak sumber daya ke proyek infrastruktur yang mungkin tidak memberikan pengembalian ekonomi yang memadai.
Resistensi dan Ketidakpastian	Pemindahan ibu kota sering kali dihadapi dengan resistensi politik dan sosial, yang dapat menghambat pelaksanaan keputusan dan menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku ekonomi.

#### 4.1.2. Upaya Mitigasi Dampak Negatif Pemindahan Ibu Kota

Dari analisis yang telah peneliti paparkan di atas, mulai dari dampaknya terhadap perekonomian yang bermuatan positif juga tantangannya yang bermuatan negatif maka adapun upaya mitigasi yang dapat dilakukannya sebagai berikut:

**Tabel.4 Analisis Upaya**

Upaya	Analisis Upaya
Perencanaan Tata Ruang yang Baik	Penting untuk memiliki perencanaan tata ruang yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengantisipasi dampak negatif seperti kemacetan lalu lintas, kekurangan air, atau polusi lingkungan.
Penyediaan Fasilitas Publik	Membangun infrastruktur sosial seperti sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan fasilitas umum lainnya untuk memenuhi kebutuhan populasi yang bertumbuh.
Pemberdayaan Ekonomi Lokal	Mendorong pengembangan industri lokal, kewirausahaan, dan pendidikan keterampilan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi penduduk lokal dan mengurangi kesenjangan ekonomi.
Pengelolaan Dampak Sosial	Mengembangkan program sosial yang mendukung integrasi penduduk baru dengan masyarakat lokal untuk mencegah konflik sosial dan mempromosikan harmoni sosial.
Pemantauan dan Evaluasi	Melakukan pemantauan terus-menerus terhadap dampak pemindahan ibu kota untuk mengevaluasi keberhasilan strategi mitigasi dan menyesuaikan kebijakan jika diperlukan.

#### 4.2. Pembahasan

Pemindahan pusat pemerintahan memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan aktivitas ekonomi. Namun, diperlukan perencanaan yang teliti dan strategi mitigasi yang efektif untuk mengatasi kemungkinan dampak negatif seperti perubahan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, pemindahan ibukota dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal sambil menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat setempat.

Pemindahan pusat pemerintahan nasional berdampak signifikan pada ekonomi lokal. Pertama, pembangunan infrastruktur baru seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di sekitar area tersebut. Kedua, keberadaan pemerintahan baru membawa peningkatan aktivitas ekonomi melalui permintaan layanan administratif dan dukungan, yang berdampak positif pada sektor-sektor seperti properti, perhotelan, dan transportasi. Namun, pemindahan ibukota juga membawa tantangan seperti peningkatan nilai properti yang dapat menyebabkan gentrifikasi, serta perubahan sosial dan demografis yang memerlukan perencanaan tata ruang yang matang dan manajemen



dampak sosial yang efisien. Upaya mitigasi yang dianjurkan termasuk perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur sosial, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pemantauan terus-menerus terhadap dampak yang terjadi. Dengan demikian, pemindahan ibukota nasional memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian lokal, namun hanya jika dikelola dengan baik melalui strategi mitigasi yang tepat.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari analisis mengenai pemindahan Ibukota Negara terhadap perekonomian lokal adalah bahwa langkah ini memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan aktivitas ekonomi. Namun, untuk mengatasi dampak negatif seperti gentrifikasi dan perubahan sosial-demografis, diperlukan perencanaan tata ruang yang matang dan implementasi strategi mitigasi yang efektif. Upaya-upaya tersebut mencakup pengembangan infrastruktur sosial, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pemantauan terus-menerus terhadap dampak yang timbul. Dengan pendekatan yang berkelanjutan dan komprehensif, pemindahan Ibukota Negara dapat menjadi kesempatan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal sambil menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

### Saran

Untuk memaksimalkan manfaat dan mengelola dampak negatif dari pemindahan Ibukota Negara, direkomendasikan untuk mengembangkan perencanaan tata ruang yang terpadu dan berkelanjutan. Fokus utama adalah pada pengembangan infrastruktur sosial seperti pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, manajemen dampak sosial dan demografis melalui program integrasi komunitas, serta melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk menyesuaikan strategi mitigasi. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan bahwa pemindahan Ibukota Negara memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal sambil tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aji, G., Arfani, Z., Sari, A. M., & Septiani, R. (2023). Dampak Pemindahan Ibukota Negara Baru terhadap Ekonomi dan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(5), 1–8.
- [2] Aprillia, D., & Supentri, S. (2024). Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Terhadap Perekonomian Di Indonesia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 376–384.
- [3] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2023). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 6,37 persen. <https://kaltim.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/1005/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--februari-2023-sebesar-6-37-persen.html>
- [4] Bappenas, M. P. P. N. (2019). Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara.
- [5] Daryono, B. S., Sarosa, W., Ubaidillah, R., Widyatmoko, D., Purnomo, D. W., Djohan, T. S., Hadisusanto, S., Aipassa, M. I., & Setyawati, T. (2023). *Pembangunan Berkelanjutan di Ibu Kota Negara Nusantara Perspektif Biologi*. UGM PRESS.
- [6] Fadillah, N. (2022). Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(1), 45–65.
- [7] Firdaus Bader. (2024). Kebijakan IKN Nusantara Percepat Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi. *Harian Ekonomi Neraca*. <https://www.neraca.co.id/article/193524/kebijakan-ikn-nusantara-percepat-pemerataan-pertumbuhan-ekonomi>
- [8] Hairunnisa, H., & Syaka, W. A. (2022). Analisis Komunikasi Politik Dalam Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Menuju Kota Berkelanjutan. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 4(1), 1–15.
- [9] Hasibuan, R. R. A., & Aisa, S. (2020). Dampak dan resiko perpindahan ibu kota terhadap ekonomi di indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 183–203.
- [10] Kompasiana. (2024). Analisis Dampak Pemindahan IKN terhadap Perubahan Ekonomi Nasional. *Kompasiana Beyond Blogging*.

- <https://www.kompasiana.com/dikanrf26/661fe7ffc57afb156d2b2392/analisis-dampak-pemindahan-ikn-terhadap-perubahan-ekonomi-nasional>
- [11] Mesoino, L. S., Naukoko, A. T., & Masloman, I. (2022). Analisis strategi pengembangan daya saing berdasarkan potensi ekonomi lokal di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(4), 112–123.
- [12] Pratama, R. N., & Terapan, M. E. (n.d.). ANALISIS POTENSI EKONOMI KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR: PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA. ResearchGate, January, 1–23.
- [13] Pribadi, D. S., & Utomo, S. (2021). Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Perspektif Persaingan Usaha *JURNAL PERSAINGAN USAHA* Vol. 02. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- [14] Sagena, U. (2005). Pergeseran Model Pembangunan Ekonomi Developmental State Jepang. *Jurnal Sosial-Politika*, 6(12).
- [15] Sagena, U. W., Febrianti, S. A., Habibah, Z. E., Nugroho, R. A., Shariffuddin, M. D. K., & others. (2022). Edukasi perempuan untuk pelestarian lingkungan melalui bank sampah di kota balikpapan sebagai wilayah penyangga ikn nusantara. *Prosiding Semnaskom-Unram*, 4(1), 307–315.
- [16] Sagena, U. W., Jaisah, M. M., Zaelani, A., Slamet, U., Shariffuddin, M. D. K., Rusdi, M., & others. (2023). EDUKASI KAPSKEL DAN KEMANGSOR UNTUK PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KOTA MINYAK BALIKPAPAN SEBAGAI WILAYAH PENYANGGA IKN NUSANTARA. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(2), 727–733.
- [17] Sihombing, M. P., & Oktavian, D. P. (2022). Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 1039–1051.
- [18] Taufiq, M., Arsitektur, S., Kebijakan, P., & Bandung, I. T. (2020). PEMINDAHAN IBU KOTA dan POTENSI KONEKTIVITAS PEMERATAAN EKONOMI. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 8(1). <https://doi.org/10.7454/jvi.v8i1.156>